

HOLISTIK

JURNAL ILMIAH INTERDISIPLINER
ISSN: 9089-6050, VOL 1, NO. 1, JANUARI 2012

Benarkah Pemilu Merupakan Manifestasi Pesta Demokrasi di Indonesia?
Syamsuddin Maldun

Pembangunan Perkotaan Dan Pedagang Kaki Lima (PKL)
Suatu Kajian Intervensi
Syamsul Bahri

Perkembangan E-Government di Indonesia; Berangkat dari Kegagalan
Arief Wicaksono

Metode Penelitian Administrasi; Ruang Lingkup Penelitian Administrasi
Muhaddadin Achmad

Reformasi Manajemen Pelayanan Publik menuju Good Governance
Juharni

Perkembangan E-Government di Indonesia; Berangkat dari Kegagalan
Arief Wicaksono

Kebijakan Publik dalam Pembangunan: Tinjauan mengenai
Lingkungan Kebijakan
Natsir Tompo

Perubahan Sosial: (Studi terhadap Komunitas Kaki di
Desa Raranggonau Kabupaten Sigi)
Nurhaedah

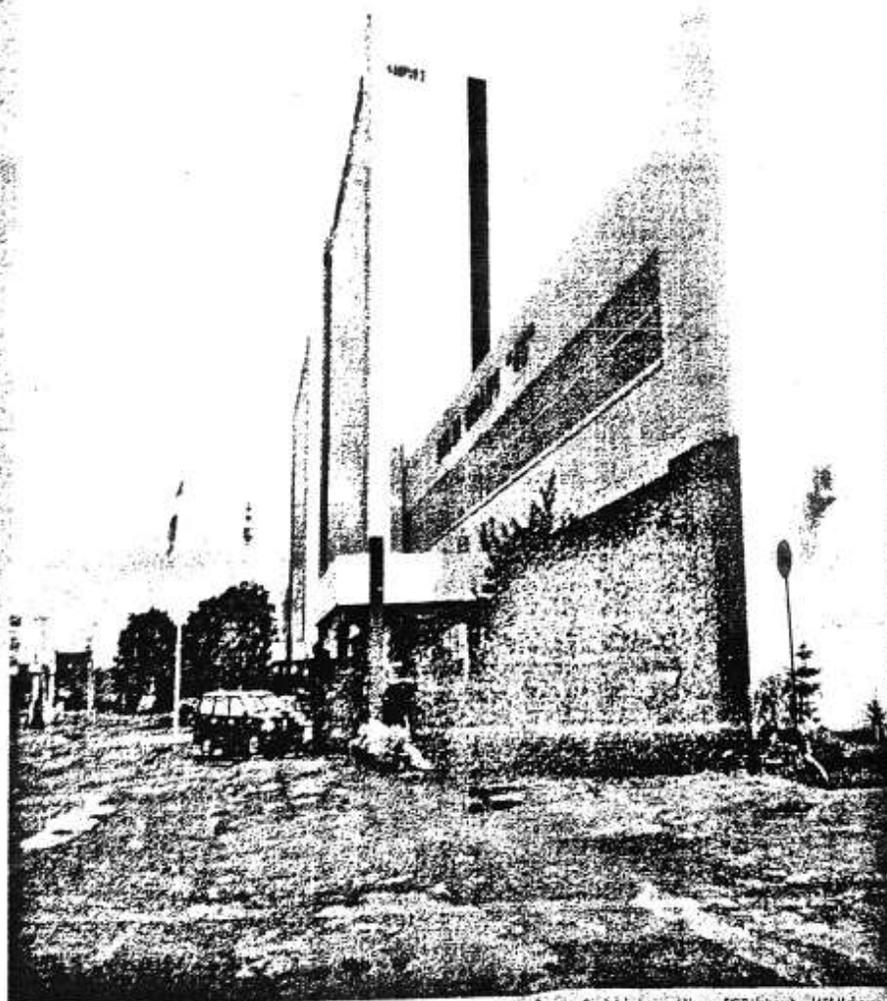
Maudu' Lompoa yang merupakan suatu kajian
Interaksionisme Simbolik
Husain Hamka

Program Studi Administrasi Negara FISIP Universitas "45" Makassar
Jl. Urip Sumaharjo Km. 4 Makassar
Telp. 0411 452901, 452709 Fax. 0411 424568
Email: holistik_fisip45@yahoo.com



HOLISTIK

JURNAL ILMIAH INTERDISIPLINER
ISSN 9089-6050 VOL 1, NO 1, JANUARI 2012



Program Studi Administrasi Negara FISIP Universitas '45' Makassar
Jl. Urip Sumoharjo Km. 4 Makassar
Telp. 0411 452901, 452789 Fax: 0411 424568
Email: holistik.fisip45@un45.com



HOLISTIK: Jurnal ilmiah Interdisipliner
ISSN 9089-6050, Volume 1, No.1, Januari 2012



HOLISTIK

JURNAL ILMIAH INTERDISIPLINER
ISSN: 9089-6050, VOL. 1, NO. 1, JANUARI 2012

SUSUNAN REDAKSI

PELINDUNG/PENASIHAT

Ketua Umum Yayasan Andi Sose
Rektor Universitas "45" Makassar

PIMPINAN REDAKSI

Drs. Syamsuddin Maldun, M.Pd.

SEKRETARIS REDAKSI

Mohammad Gazali Rettob, S.Ip.

NITRA BASTARI

Prof. Dr. H. Muh. Ramli, M.Si.
Dr. H. M. Isa Sjamsu, M.Pd.

REDAKTUR PELAKSANA

Dra. Hj. Juharni, M.Si.
Drs. M. Natsir Tompo, M.Si.
Drs. Udin B. Sore, SH, M.Si.
Dra. Nurkaidah, M.M.

PENYUNTING/EDITOR

Drs. H. Misbahuddin Achmad, M.S,
Arief Wicaksono, S.Ip. M.Si.
Drs. H. Husain Hamka, M.S.
Drs. Syamsul Bahri, M.Si.
Dra. Hj. Nurmi Nonci, M.Si.

SEKRETARIAT :

Sobirin, S.S.
Drs. Muhammad Ramli
Muhammad Jufri, S.Ip.
Ali Baba, S.E.



SEKAPUR SIRIH DARI REDAKTUR

Dengan Rahmat Allah SWT. dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Serta upaya yang maksimal dan kolektif dari tim penyusun, sehingga penerbitan dan volume pertama "Jurnal Holistik" Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Makassar dapat terwujud. Tentunya tujuan kami, dengan kehadiran Jurnal ini dapat memenuhi penantian panjang dan harapan dari para pembaca dan para penulis berbagai kalangan secara universal, agar menjadikan "Jurnal Holistik" sebagai media ilmiah yang terdepan dan terpercaya untuk pengembangan ilmu administrasi publik khususnya dan ilmu sosial pada umumnya.

Edisi kali ini diisi berbagai isu-isu menarik yang diangkat oleh penulis-penulis yang professional dibidangnya. Gagasan dalam jurnal ini diawali oleh Syamsuddin Maldun yang mempertanyakan, Benarkah Pemilu Merupakan Manifestasi Pesta Demokrasi di Indonesia? Dengan mengetengahkan fenomena dan fenomena implementasi Pemilu di Indonesia sejak Orde Lama, Orde Baru, hingga Orde Reformasi beserta terapi Pemilu yang diharapkan. Selanjutnya, Syamsul Bahri mengetengahkan Pembangunan Perkotaan dan Pedagang Kaki Lima dengan menggunakan kajian pemikiran intervensionis. Dan Arief Wicaksono memberikan pemikiran cemerlangnya tentang bagaimana sebuah kegagalan dapat memberikan kontribusi positif selain berbagai keberhasilan pembangunan sektor E-Government di Indonesia.

Selain itu, Misbahuddin Ahmad, memberikan pencerahan tentang metodologi penelitian Ilmu Administrasi yang dapat menjadi sumber yang konstruktif bagi pengembangan teori dan praktek berbagai strata pendidikan. Kemudian, Juhami mengemukakan pentingnya reformasi manajemen pelayanan publik untuk mewujudkan good governance. Demikian juga dengan kehadiran etnis China dalam dinamika kehidupan masyarakat Indonesia, memberikan warna tersendiri terhadap intraksi sosial di perkotaan. Begitu pula sumbangsi pemikiran terhadap Dengan demikian kebijakan publik dalam pembangunan, termanifestasi dalam lingkungan kebijaksanaan yang obyektif. Komunitas Kaili sebagai suatu suku bangsa mayoritas bermukim di Kabupaten Sigi. Umumnya komunitas suku bangsa tersebut hidup sebagai petani, mereka yang mendiami daerah pantai, sedikit yang menjadi nelayan. Sehingga pada akhirnya ritual Maudu' Lompoa yang merupakan suatu kajian interaksionisme simbolik dapat memberikan pencerahan tentang aneka kultur yang sarat dengan makna dapat menjadi sebuah kearifan lokal dalam bertindak global.

Akhirnya kepada seluruh tim penyusun diharapkan tetap memelihara etos kerja dan solidaritas yang tinggi, sehingga penerbitan "Jurnal Holistik" selanjutnya tetap dapat diwujudkan. Selanjutnya kepada para penulis, senantiasa kami nantikan pemikiran-pemikirannya yang berlian dapat dituangkan dalam media ilmiah "Jurnal Holistik" di masa yang akan datang. Demikian juga harapan kami yang tiada henti kepada para pembaca, agar menjadikan "Jurnal Holistik" sebagai sumber utama referensi dalam mencermati kehidupan berbangsa dan bernegara serta diharapkan berpartisipasi aktif mempertahankan "Jurnal Holistik" tetap dapat terbit dan dihadirkan dihadapan para pembaca yang budiman. Dan terutama harapan kami, bahwa semoga dengan kehadiran "Jurnal Holistik" membawa manfaat yang besar terhadap recovery tata kelola pemerintahan, bangsa dan Negara, sehingga mendapat ridhoa dari Allah SWT. Amiin ya Rabbal alamin.

Selamat Menikmati



DAFTAR ISI

Sekapur Sirih dari Redaktur.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Benarkah Pemilu Merupakan Manifestasi Pesta Demokrasi di Indonesia? <i>Syamsuddin Maldun</i>	1-12
Pembangunan Perkotaan Dan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Suatu Kajian Intervensi <i>Syamsul Bahri</i>	13-21
Perkembangan E-Government di Indonesia; Berangkat dari Kegagalan <i>Arief Wicaksono</i>	22-27
Metode Penelitian Administrasi; Ruang Lingkup Administrasi Negara (Bagian Kesatu) <i>Misbahuddin Achmad</i>	28-32
Reformasi Manajemen Pelayanan Publik menuju Good Governance <i>Juhami</i>	33-48
Identitas Etnis China di Perkotaan <i>Nurmi Nonci</i>	49-60
Kebijakan Publik dalam Pembangunan; Tinjauan mengenai Lingkungan Kebijakan <i>Natsir Tompo</i>	61-75
Perubahan Sosial: (Studi terhadap Komunitas Kaili di Desa Raranggonau Kabupaten Sigi) <i>Nurhaedah</i>	76-91
Maudu' Lompoa yang merupakan suatu kajian interaksionisme simbolik <i>Husain Hamka</i>	92-110



Perkembangan E-Government di Indonesia: *Berangkat dari Kegagalan bukan dari Kesuksesan*

Arief Wicaksono, MA

Abstrak

Telah banyak ahli dan lembaga yang banyak mengkaji e-gov telah memaparkan berbagai temuan tentang kegagalan *e-government*, antara lain Heeks dan Bhatnagar, 2001; Fulton, 2003; UNDESA, 2003a; dan Heeks, 2006, dengan variasi estimasi kegagalan sebesar 60% (dalam Gartner, 2002), hingga 80% (UNDESA, 2003b), dan sampai ke tingkat 85% (Symonds, 2000). Berbagai temuan tentang kegagalan tersebut bukan hanya menunjukkan bukti bahwa masyarakat dunia ternyata (masih) harus kembali mengevaluasi peran teknologi informasi (TI) dalam sektor publik dan mendorong timbulnya pemahaman yang lebih dalam terhadap proses-proses aktualnya dilapangan, tetapi juga mengingatkan kita tentang pentingnya posisi warga negara dalam e-gov, terutama dalam era desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia saat ini.

Dalam kajian selanjutnya, penulis menemukan kesenjangan antara 'keharusan' untuk menggunakan teknologi informasi (TI) dalam sektor publik dan realitasnya. Kesenjangan ini disebabkan oleh dominannya peran negara atau pemerintah sekaligus minimnya ketrampilan negara atau pemerintah menguasai krisis dan *risk management* untuk mengantisipasi gap tersebut. Disini posisi politis warga masyarakat seringkali berada pada level sub-ordinat (dan kiranya akan selalu demikian), karena selalu tidak cermat dalam membangun posisi tawar terhadap berbagai layanan sektor publik yang disediakan negara atau pemerintah (Hood and Lodge, 2006).

Ketidacermatan warga masyarakat dalam membangun posisi tawar dengan negara atau pemerintah, menurut asumsi penulis, terjadi karena sikap terlalu sederhana (polos, lugu) warga masyarakat dalam merespon dinamika perubahan sosial yang terjadi. Sehingga yang terjadi kemudian adalah terciptanya stigma bahwa kegagalan tersebut berasal dari sikap warga yang demikian. Warga hanya belum menyadari pentingnya *network* sebagai sebuah kekuatan sosial yang kohesif, dan oleh karena itu, merekapun menyikapinya dengan sikap yang cenderung apatis (Grewal, 2008).

Terakhir, penulis sependapat dengan upaya untuk memunculkan sikap baru yang lebih kritis bagi para stakeholder e-gov, termasuk warga masyarakat, agar bersama-sama dapat melakukan sesuatu, dengan memulainya justru dari berbagai kegagalan. Bukan dengan menganalisa *style* kepemimpinan aktor politik lokal, bukan dari cerita-cerita sukses ditempat tertentu, dan juga bukan dari upaya metodologis yang bersifat sangat semantik, seperti pada upaya *rethinking*, atau *redefinisi*.

Kata Kunci: e-gov, e-government, kegagalan, hak, warga negara, hak warga



Pendahuluan

Hampir sebagian besar proyek *e-government* (selanjutnya disebut *e-gov-Pen.*) yang pernah ada didunia, gagal. Hanya sedikit saja proyek *e-gov* yang disebut sebagai proyek yang sukses. Pernyataan tersebut bukannya tanpa dasar argumentasi yang jelas. Beberapa *expert* dan lembaga yang banyak mengkaji *e-gov* telah memaparkan berbagai temuan yang mendukung itu (Heeks dan Bhatnagar, 2001; Fulton, 2003; UNDESA, 2003a; dan Heeks, 2006), dengan variasi estimasi kegagalan sebesar 60% (Gartner, 2002), hingga 80% (UNDESA, 2003b), dan sampai ke tingkat 85% (Symonds, 2000).

Berbagai temuan tentang kegagalan tersebut bukan hanya menunjukkan bukti bahwa masyarakat dunia ternyata (masih) harus kembali mengevaluasi peran teknologi informasi (TI) dalam sektor publik dan mendorong timbulnya pemahaman yang lebih dalam terhadap proses-proses aktualnya dilapangan, tetapi juga mengingatkan kita tentang pentingnya posisi warga negara dalam *e-gov*, terutama dalam era desentralisasi dan otonomi daerah di

Indonesia saat ini.

Sementara itu, disisi yang lain, wacana tentang *e-gov* yang terus didorong lajunya oleh PBB atau institusi multilateral seperti Bank Dunia misalnya, masih saja yakin dengan potensi penyebaran nilai-nilai positif *e-gov* yang konon akan lebih dapat dirasakan manfaatnya oleh para *stakeholder*, karena penggunaan TI dalam sektor publik ini niscaya dapat menghasilkan beberapa bentuk hubungan mutual seperti, *G2C (Government to Citizen)*, *G2B (Government to Business Enterprises)*, *G2G (Government to Government)*, dan *G2E (Government to Employees)* (*E-gov* dalam worldbank.org, 2010).

Yang patut disayangkan, cara-cara berpikir khas lembaga multilateral, *one fits for all* seolah harus selalu ditempuh dengan menggunakan metode konvensional semisal diseminasi *cerita sukses*, duplikasi implementasi keberhasilan dari satu tempat ke tempat yang lain, dan sebagainya. Padahal dalam realitasnya, penerapan TI dalam sektor publik di satu wilayah dengan wilayah yang lain di Amerika Serikat misalnya, tentunya memiliki konteks,



latarbelakang, motif, dan sikap penanganan masalah yang berbeda-beda. Apalagi jika kita berbicara Indonesia sebagai sebuah negara *latecomers*.

Posisi Warga Negara dalam Kegagalan Proyek E-Gov

Mengapa terjadi kegagalan? Bagaimana negara atau pemerintah mengantisipasi kegagalan tersebut? Dimana posisi warga dalam kegagalan tersebut? Apakah kegagalan tersebut memproduksi stigma yang harus ditanggung warga? Inilah sederet pertanyaan yang muncul, ketika kita ingin memahami lebih jauh, tentang mengapa dan bagaimana e-gov sebagai proyek dunia ini tidak berjalan mulus dalam implementasinya.

Beberapa faktor yang ditengarai sebagai sumber tidak berhasilnya implementasi e-gov antara lain adalah, *pertama*, muncul dan berkembangnya pemahaman bahwa e-gov adalah sebuah produk dunia yang merupakan prioritas global dan bersifat mondial, sehingga harus dipromosikan secara seragam ke mana-mana, keseluruh

penjuru dunia (UNDESA, 2010). *Kedua*, tidak berkembangnya pemahaman bahwa e-gov adalah sebuah sistem yang sangat bergantung pada bangunan sistem informasi, dimana disitu terdapat penanganan data dan harapan tentang bagaimana informasi *ter-delivery* untuk menunjang *decision* dan *transaction*. E-gov adalah sebuah dimensi *socio-technical* dari globalisasi, dia melibatkan teknik dan manusia sebagai makhluk sosial.

Ketiga, dipahaminya e-gov oleh sebagian besar pemangku kepentingan sebagai *e-business*, padahal semua pemangku kepentingan juga paham, bahwa mecangkokkan ide-ide sektor privat kedalam sektor publik, adalah hal yang sangat sulit. *Keempat*, tidak berhasilnya e-gov dimaknai sebagai sistem yang sangat luas konteksnya, dimana didalamnya melibatkan warga masyarakat, manajemen, agensi-agensi publik, *vendor-vendor* TI, politik, hukum, budaya, dan lain sebagainya (Heeks, 2006: 1).

Bercermin dari pendapat Heeks, penulis kemudian bisa menarik sebuah



argumen, bahwa terdapat kesenjangan yang sangat besar antara 'keharusan' untuk menggunakan teknologi informasi (TI) dalam sektor publik dan realitasnya. Kesenjangan ini lebih disebabkan oleh masih dominannya peran negara atau pemerintah atas warganegara, yang diperparah oleh minimnya ketrampilan menguasai krisis dan *risk management* negara atau pemerintah untuk mengantisipasi *gap* tersebut. Disini posisi politis warga masyarakat seringkali berada pada level sub-ordinat (dan kiranya akan selalu demikian), karena selalu tidak cermat dalam membangun *bargains* atau posisi tawar terhadap berbagai layanan sektor publik yang disediakan negara atau pemerintah (Hood and Lodge, 2006), termasuk e-gov.

Pada konteks Indonesia di masa lalu dan bahkan hingga saat ini, ketidakcermatan warga masyarakat dalam membangun posisi tawar dengan negara atau pemerintah, menurut asumsi penulis, terjadi karena sikap terlalu sederhana (polos, lugu) warga masyarakat dalam merespon dinamika perubahan sosial yang terjadi. Sehingga

yang terjadi kemudian adalah terciptanya stigma bahwa kegagalan tersebut berasal dari sikap warga yang demikian. Padahal mungkin, warga hanya terkesan belum menyadari pentingnya *network* sebagai sebuah kekuatan sosial yang kohesif, dan oleh karena itu, merekapun menyikapinya dengan sikap yang cenderung apatis (Grewal, 2008).

E-Government konteks Sulawesi Selatan

Dengan menggunakan pendekatan dan metode yang agak terbatas, sebuah *rapid assessment* yang dilakukan oleh L&DO Makassar sebagai bagian dari konsorsium lokal *Partnership for Public Service*, menyoroti implementasi proyek-proyek e-gov di propinsi Sulawesi Selatan (Tribun Timur, 15 & 16 September dan 18 Oktober 2010).

Alih-alih ingin menjadikan sebuah kabupaten/kota menjadi *cybercity* dimasa depan (Tribun Timur, 1 November 2010), hasil asesmen justru menunjukkan ditemukannya beberapa pemerintah daerah yang kurang menunjukkan *effort* terhadap mendorong eksistensi web sebagai salah satu instrumen penting dari

implementasi e-gov, dalam bentuknya yang paling sederhana (sosialisasi dan promosi pemda) sekalipun (Ibid).

Meskipun dilaksanakan dengan sangat sederhana dan kurang mengurai masalah-masalah yang lebih detail, namun hasil asesmen tersebut berguna untuk menunjukkan dan melengkapi informasi kita bahwa, fakta demi fakta kegagalan implementasi proyek e-gov yang dilakukan oleh negara atau pemerintah, tidak dapat dihindarkan. Dan dalam konteks politik pelayanan sektor publik, negara atau pemerintah dituntut untuk memposisikan diri sejajar dan melakukan pemihakan yang mutlak kepada warga masyarakat sebagai konstituen, karena satu hal yang pasti, kegagalan tersebut hanya menghasilkan pemborosan dan kesia-siaan penggunaan anggaran dan sumber daya manusia serta sumber daya politik yang masif (Gubbins, 2004), dan pada saat yang sama, juga sangat mencerminkan ketidakmampuan negara / pemerintah dalam men-*delivery* nilai-nilai penting e-gov kepada warga masyarakat, yang secara normatif, paling berhak

menerimanya.

Penutup

Disini penulis tidak hendak berusaha melihat e-gov dari jendela pesimisme dengan melibatkan sikap sinis terhadap upaya yang telah dilakukan PBB, World Bank, dan L&DO misalnya, tapi sebenarnya lebih cenderung kepada upaya untuk memunculkan sikap baru yang lebih kritis bagi para stakeholder e-gov, termasuk warga masyarakat, agar bersama-sama dapat melakukan sesuatu, dengan memulainya justru dari berbagai kegagalan, yang membentuk asumsi dasar dari semua pernyataan diawal tulisan ini, bukan dengan melakukan analisis terhadap *style* kepemimpinan aktor politik lokal yang mendominasi, bukan dari buaian banyaknya cerita-cerita sukses ditempat-tempat tertentu, dan juga bukan dari upaya metodologis yang sebenarnya lebih kental nuansa semantiknya seperti melakukan upaya *rethinking*, atau *redefinisi*.



Referensi:

Fulton, B. (2003), 'Leveraging technology in the service of diplomacy', in M.A. Abramson and T.L. Morin (eds), *E-Government 2003*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield

Gartner (2002), *GartnerEXP Says a Majority of E-Government Initiatives Fail or Fall Short of Expectations*, d a l a m <http://symposium.gartner.com/story.php?id.1367.s.5.html>. Diakses 1 November 2010.

Grewal, David Singh (2008), *Network Power; the Social Dynamics of Globalization*, London, New Heaven: Yale University Press.

Gubbins, M. (2004) 'Global IT Spending by Sector', *Computing*, 8 April: 28 dalam R.B. Heeks (2006)

Heeks, R.B. (ed.) (2001), *Reinventing Government in the Information Age*. London: Routledge.

Heeks, R.B. (2006), *Implementing and Managing eGovernment; An International Text*, London: SAGE Publications.

Heeks, R.B. and Bhatnagar, S.C. (2001), 'Understanding Success and Failure in Information Age Reform', dalam R.B. Heeks (ed.), *Reinventing Government in the Information Age*. London: Routledge.

Hood, Christopher and Martin Lodge (2006), *The Politics of Public Service Bargains; Reward, Competency, Loyalty, and Blame*, London, Oxford: Oxford University Press

Symonds, M. (2000), 'Government and the Internet', *Survey, The Economist*, 355: 24 June dalam R.B. Heeks (2006).

Tribun Timur, 15 September 2010

Tribun Timur, 16 September 2010

Tribun Timur, 18 Oktober 2010

Tribun Timur, 26 Oktober 2010

Tribun Timur, 1 November 2010

UNDESA, (2003a), *eGovernment at the Crossroads*, New York: UN Department for Economic and Social Affairs, dalam R.B. Heeks (2006).

UNDESA (2003b), 'E-government as a "free lunch"?'', *Development Administration*, 106: 6-8. dalam R.B. Heeks (2006).

UNDESA (2010), *eGovernment Survey 2010; Leveraging e-Government at a Time of Financial and Economic Crisis*, New York: UN Department for Economic and Social Affairs

www1.worldbank.org/publicsector/egov/
Diakses 1 November 2010.



ISSN 9089-6050



9 772069 605452